

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya karena tanpa biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. (Darwin, 2010:1)

Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu menggantungkan/mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. (Faizatullailah, 2013).

Ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat harus diminimalisir, sehingga pemerintah daerah lebih memaksimalkan perolehan pendapatan yang dihasilkan secara lokal. Jadi tingginya pendapatan yang dihasilkan secara lokal menjadi salah satu standar keberhasilan (Dwi Nurjanati 2017). Otonomi daerah ini mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan. (Prana, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. (Gitaningtyas, dkk 2014)

Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri (Isti dan Kusuma, 2014). Dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi parkir merupakan potensi yang cukup besar dan cukup menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (Aprilianti dan Hapid 2018).

Dengan meningkatkan kapasitas penerimaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, melihat akan pentingnya perluasan lahan untuk parkir menimbang semakin meningkatnya jumlah kendaraan dengan peningkatan kapasitas jumlah penduduk setiap tahunnya. Retribusi parkir merupakan bentuk untuk mewujudkan peningkatan dari pendapatan asli daerah.(Isti dan Kusuma 2014).

Faktor-faktor ekonomi seperti jumlah penduduk diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah Artinya jika jumlah penduduk bertambah maka kemampuan membayar kewajiban terhadap daerah

juga akan meningkat maka akan memberikan dampak yang baik bagi penerimaan daerah yang dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah. (Murib, dkk 2018)

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. (Widanta dan Jaya 2014).

Fenomena terkait penelitian ini seperti yang di lansir oleh <https://www.radartasikmalaya.com/target-pendapatan-dishub-pangandaran-turun-drastis/> Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Turun Drastis. Karena capaian target di tahun 2018 tidak tercapai. Kabid Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Rodih mengatakan target PAD Dishub pada anggaran murni 2018 Rp 6,9 M dan anggaran perubahan diturunkan menjadi Rp 4,8 M. “kita salah perhitungan, akhirnya target tidak tercapai dan pada perubahan nilai target diturunkan” terangnya kepada Radar, Jumat (18/1). Menurutnya, ada lima sumber Pad yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2018 yakni retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan dan retribusi pemberian izin trayek. “dari target Rp 4,8 M, realisasi hanya Rp 2,6 M atau 53,79 persen” terangnya. Lanjut dia, sumber PAD yang melampaui target hanya retribusi pemberian izin trayek dengan capaian Rp 3 Juta dari target awal Rp 2,4 juta. “pencapaiannya melebihi target hingga 125 persen” terangnya. Kadishub Kabupaten Pangandaran Saefulloh mengatakan target PAD tahun 2019 turun menjadi Rp 3,1 M. (Kadishub Kabupaten Pangandaran Saefulloh 2019)

Fenomena lain yang terjadi seperti yang di lansir oleh <https://ayobandung.com/read/2020/01/13/76155/target-pbb-bandung-barat-hanya-tercapai-56> Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat pada 2019 lalu tidak memenuhi target. Dari target yang dicanangkan sebesar Rp 450 miliar, hanya terpenuhi Rp 377 miliar atau defisit sekitar Rp 73 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin mengatakan, salah satu penyebab tidak tercapainya target PAD pada 2019 yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya tercapai 56 persen. "Ada beberapa pajak memenuhi target dan yang tidak memenuhi target. Tetapi, yang paling besar menyebabkan defisit sampai Rp 73 miliar yaitu dari PBB hanya 56 persen. Nah, 56 persen itu kalau secara nominal itu sekitar Rp 90 miliaran lebih," ujar Asep, Minggu (12/1/2020). Menurut Asep, menurunnya pendapatan daerah dari sektor PBB disinyalir karena adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sehingga masyarakat kaget dan belum siap dengan nominal kenaikan PBB. "Meski PBB menjadi penyumbang defisit paling besar dari sepuluh jenis sektor pajak daerah, namun secara nominal ada kenaikan jumlah PBB dibandingkan pada 2018 yang masih memakai NJOP lama," katanya. Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Agustina Piryanti menjelaskan, capaian nilai realisasi PBB ini diakibatkan beberapa faktor. Mulai dari NJOP serta kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban untuk membayar PBB (Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin 2020).

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Retribusi Parkir, Jumlah Penduduk dan**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

| Kabupaten | Thn  |   | Retribusi Parkir<br>(Rp) |   | Jumlah Penduduk<br>(Jiwa) |   | Pendapatan Asli<br>Daerah (Rp) |
|-----------|------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|
| Bekasi    | 2017 | ↑ | 85.315.000               | ↑ | 2443498                   | ↑ | 2.311.805.849.243              |
|           | 2018 | ↑ | 94.138.000               | ↑ | 2538388                   | ↓ | 2.094.369.342.687              |

Sumber: (BPK Jawa Barat (data diolah), 2020)

Dari tabel diatas pada tahun 2017 penerimaan Retribusi Parkir sebesar Rp. 85.315.000 terjadi kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp. 94.138.000, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.311.805.849.243 terjadi penurunan ditahun 2018 sebesar Rp. 2.094.369.342.687, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Parkir tahun 2018 tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, karena salah satu pengaruh pendapatan asli daerah dari retribusi daerah yaitu retribusi parkir yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada retribusi parkir maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan retribusi parkir dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah menurut Isti dan Kusuma (2014:470).

Sedangkan untuk Jumlah Penduduk pada tahun 2017 adalah 2443498 jiwa dan tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 2538388 jiwa sedangkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.311.805.849.243 terjadi penurunan ditahun 2018 sebesar Rp. 2.094.369.342.687, hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tahun 2018 tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, karena Jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah memiliki keterkaitan

yaitu besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Menurut Ariyani, dkk (2018:61).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh retribusi parkir dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan, dilakukan oleh Keke Aprilianti, Hapid, Muh. Yusuf Qamaruddin, dengan judul Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo dengan hasil menunjukkan bahwa variabel Retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan 0,005 karena lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya semakin tinggi hasil retribusi parkir maka semakin tinggi pula retribusi yang diberikan kepada daerah, sehingga meningkatkan pendapatan daerah .

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aslim, Abubakar Hamzah dan Mohd Nur Syechalad, dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dengan hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Retribusi Parkir dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten di Jawa Barat)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Turun Drastis
2. Kabupaten Bandung Barat dari sektor pajak daerah pada 2019 lalu tidak memenuhi target.

### **1.2.1 Batasan masalah**

Identifikasi masalah penelitian ini hanya memfokuskan menilai retribusi parkir dan jumlah penduduk dalam menunjang pendapatan asli daerah di beberapa Kota dan kabupaten di Jawabarar.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menyebutkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah ?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten di Jawa Barat

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten di Jawa Barat

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk peneliti maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu diharapkan dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh retribusi parkir dan jumlah penduduk. Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman. Penelitian ini berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat.